

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026. PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP RANCANGAN APBD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2027

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengapresiasi penyampaian Raperda dan Nota Keuangan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah catatan terhadap pendapatan dan arah belanja daerah. Fraksi menilai potensi PAD dari pariwisata Geopark, perikanan, UMKM batik, aset daerah, dan BUMD belum dioptimalkan serta meminta strategi konkret melalui ekstensifikasi dan digitalisasi pajak. Pada sisi belanja, Fraksi menilai program padat karya, UMKM, pertanian, dan jaring pengaman sosial perlu memperoleh perhatian lebih besar serta mendorong minimal 30 persen belanja langsung diarahkan pada sektor produktif yang menyerap tenaga kerja, penguatan UMKM, serta subsidi pupuk dan alat pertanian. Proporsi belanja operasi sebesar 66,89 persen dibanding belanja modal 11,86 persen juga dinilai belum optimal untuk mendukung percepatan infrastruktur dasar dan pariwisata yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan.

Fraksi turut meminta penyaluran hibah fasilitasi bina mental spiritual dilakukan secara maksimal, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel serta mendorong perbaikan perencanaan dan transparansi Pokok-Pokok Pikiran DPRD agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam APBD. Terhadap defisit Rp75,22 miliar, Fraksi mempertanyakan realistiknya asumsi SiLPA 2026 sebesar Rp109,67 miliar dan meminta penyertaan modal BUMD Rp14,44 miliar disertai kajian kelayakan investasi serta target dividen yang jelas. Fraksi berharap pembahasan RAPBD dilakukan secara cermat dan selaras dengan KUA-PPAS agar APBD menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Catatan:

- Pandangan Umum membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
- Dokumen ditandatangani oleh Sri Khalimah, S.Sos. selaku Ketua Fraksi dan Agung Nur Wahid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fraksi.
- Dokumen terdiri atas 12 halaman.

Tag/Keyword: Pandangan Umum Fraksi; Partai Persatuan Pembangunan; PPP; RAPBD 2027; APBD Kabupaten Kebumen; PAD; Belanja Daerah; UMKM; Pertanian; Infrastruktur; Hibah; Pokir DPRD; BUMD

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2026. GENERAL VIEW OF THE PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) FACTION ON THE DRAFT REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF KEBUMEN REGENCY FOR FISCAL YEAR 2027

The Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Faction appreciates the submission of the 2027 Draft Regional Revenue and Expenditure Budget (RAPBD) and its Financial Note while raising several concerns regarding regional revenue and expenditure priorities. The Faction considers the revenue potential of Kebumen Geopark tourism, fisheries, batik MSMEs, regional assets, and region-owned enterprises to remain underutilized and calls for concrete measures through tax extensification and digitalization. On expenditure, the Faction calls for greater attention to labor-intensive programs, MSMEs, agriculture, and rural social safety nets, proposing that at least 30 percent of direct expenditure be directed toward productive sectors that create employment, strengthen MSMEs, and support fertilizer and agricultural equipment subsidies. The proportion of operating expenditure at 66.89 percent compared with capital expenditure at 11.86 percent is also considered insufficient to support basic infrastructure and tourism development aimed at poverty reduction.

The Faction also calls for transparent, well-targeted, and accountable distribution of spiritual development facilitation grants and improvements in the planning and transparency of the DPRD's Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) so that public aspirations can be accommodated in the regional budget. Regarding the IDR 75.22 billion deficit, the Faction questions the realism of the projected IDR 109.67 billion SiLPA for 2026 and requests that the IDR 14.44 billion capital participation in region-owned enterprises be supported by an investment feasibility study and clear dividend targets. The Faction expects the RAPBD deliberation to be conducted carefully and consistently with the KUA-PPAS so that the APBD can effectively address community needs and improve public welfare.

Note:

- *The General View was presented at a Plenary Meeting of the Kebumen Regency DPRD.*
- *The document was signed by Sri Khalimah, S.Sos., Chair of the Faction, and Agung Nur Wahid, S.H., M.H., Secretary of the Faction.*
- *The document consists of 12 pages.*

Keywords: *General View; United Development Party Faction; PPP; 2027 Draft APBD; Regional Own-Source Revenue; Regional Expenditure; MSMEs; Agriculture; Infrastructure; DPRD Pokir; Region-Owned Enterprises*